



## Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini<sup>1</sup>

Oleh

Tadjuddin Noer Effendi<sup>2</sup>

### Abstrak

Artikel ini menguraikan tiga isu pokok: gotong royong sebagai perasan dari Pancasila dan penerapannya dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari, gotong royong mengandung beberapa unsur-unsur modal sosial serta kondisi masyarakat kontemporer yang berada dalam situasi kekacauan sosial karena lemahnya penerapan nilai-nilai gotong royong dalam interaksi sosial. Diduga perubahan sosial yang cepat serta kuatnya tekanan dari luar, terutama ideologi liberal yang berdasarkan individualis menjadi penyebab kekacauan sosial. Agenda ke depan untuk menguatkan kembali budaya gotong royong juga dibahas dalam tulisan ini.

**Kata kunci:** Gotong-royong, Pancasila, Modal Sosial, Perubahan Sosial

### Abstract

This article examines three main issues: gotong royong as a derivation of Pancasila, its application in social interaction of daily life, gotong royong comprises some elements of social capital and later the chaotic conditions of contemporary society partly due to lack of the practices of gotong royong values in social interaction. It is argued that rapid social change and the strong influence of external pressure, especially liberal ideology based on individualism is determined the chaotic situation. Further agendas to vitality the culture of gotong royong are also discussed in this article.

**Keywords:** Gotong-royong, Pancasila, Social Capital, Social Change

### A. Pendahuluan

Artikel ini berusaha menguraikan tiga pokok bahasan. Pertama, membahas gotong-royong sebagai perasan Pancasila. Bahasan bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dalam masyarakat bagaimana menerapkan Pancasila dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari. Salah satu praksis Pancasila dalam relasi sosial kehidupan

masyarakat adalah gotong-royong dan nilai-nilai modal sosial. Uraian ini bertujuan menunjukkan bahwa budaya gotong-royong sebagai sebuah nilai moral (values) mempunyai akar filosofis dalam kajian akademis. Ditunjukkan bahwa dalam budaya gotong royong melekat nilai-nilai modal sosial yang diperlukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, ditelaah secara singkat situasi

---

<sup>1</sup> Draft awal artikel ini dipersiapkan untuk bertujuan menunjukkan bahwa budaya seminar “Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat” dilaksanakan oleh Kementerian Dalam gotong royong sebagai sebuah nilai Negeri RI, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 29 Mei 2013 di Banjarmasin.

<sup>2</sup> Tadjuddin Noer Effendi adalah Guru Besar Sosiologi, Fisipol UGM.

interaksi sosial masyarakat kontemporer. Fokus bahasan diarahkan bahwa akhir-akhir ini masyarakat terindikasi mengalami kekacauan sosial karena dalam relasi sosial meninggalkan semangat dan nilai-nilai gotong royong. Terakhir didiskusikan yang perlu dilakukan untuk menguatkan kembali budaya gotong royong sebagai modal sosial dalam meraih kesejahteraan bersama.

## B. Gotong-Royong sebagai Perasaan Pancasila

Catatan sejarah saat detik-detik kemerdekaan Indonesia ketika para pemimpin bangsa sedang merumuskan dasar Indonesia merdeka, ada pembelajaran penting yang perlu dicatat bahwa Pancasila lahir melalui proses demokrasi partisipatif bersifat musyawarah dan mufakat. Menelusuri catatan notulen sidang anggota *Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan* (BPUPK) yang anggotanya terdiri dari 67 orang dapat kita jadikan rujukan bagaimana demokrasi partisipatif berlangsung. BPUPK resmi dibentuk tanggal 29 April 1945.<sup>3</sup> Masa sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam pidato pembukaan sidang pertama, ketua BPUPK Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota peserta sidang: *"Apa dasar Negara Indonesia merdeka?"* Pertanyaan ini menjadi inti pidato yang diminta untuk disiapkan dan

disampaikan oleh seluruh peserta dalam sidang selama 29 Mei -1 Juni 1945. Sejak hari pertama satu per satu anggota BPUPK menyampaikan gagasan, ide dan pandangan secara terbuka tentang dasar Indonesia merdeka. Tetapi tidak semua peserta sidang menyampaikan pidato. Dari yang menyampaikan ada beberapa yang naskah asli belum ditemukan. Dari naskah pidato para peserta sidang, gagasan, ide dan pandangan dasar Indonesia merdeka dapat dikelompokkan ke dalam tiga besar<sup>4</sup>, yakni dasar Kebangsaan, dasar Agama Islam dan dasar Jiwa Asia Timur Raya.

Selain itu, ada seorang anggota Supomo, dalam pidato mengajukan gagasan integralistik.<sup>5</sup> Supomo menyampaikan bahwa:

*"Menurut paham integralistik negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan."*<sup>6</sup>

<sup>3</sup> A.B.Kusuma, 2004, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.10.

<sup>4</sup> Ibid hal. 75

<sup>5</sup> Op.Cit, Kusuma, hal.124-125

<sup>6</sup> Menurut catatan Kusuma (2004, 16-17) Supomo telah meninggalkan ide intergralistik sejak tanggal 11 Juli 1945 saat mulai menyusun UUD 1945. Tetapi ide ini

Dalam menyampaikan gagasan dasar Indonesia merdeka itu, ada 2 orang anggota BPUPK, Susanto Tirtodirodjo dan Supomo, secara tegas dalam pidatonya menyampaikan menolak paham Liberalisme dan sistem Demokrasi Barat<sup>7</sup>, alasan penolakan adalah:

*“Liberalisme seperti yang diterapkan di Eropa Barat bersifat perseorangan. Sifat individual ini mengenai segala lapangan hidup (sistem undang-undang, ekonomi dll) memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan yang lain. Seseorang manusia dan negara dianggap sebagai seseorang pula, selalu mencari jalan untuk merebut kekuasaan dan kekayaan benda-benda segala-galanya menimbulkan imperialisme dan sistem yang memeras membikin kacau balaunya dunia lahir dan batin. Sifat demikian harus kita jauhkan dari pembangunan negara Indonesia.”*

Meskipun para anggota BPUPK telah menyampaikan pidato dan mengajukan beberapa gagasan dasar Indonesia merdeka tetapi belum ada yang secara sistematis mengajukan ide dan memberikan jawaban apa dasar Indonesia merdeka. Tiba saat sidang pada tanggal 1 Juni 1945 Sukarno mendapat giliran terakhir untuk menyampaikan gagasannya. Sukarno mengemukakan dalam pidatonya secara jelas memberikan jawaban atas pertanyaan apa dasar Indonesia merdeka. Pada awal pidatonya

Sukarno mengatakan bahwa pidato sebelum tanggal 1 Juni belum ada anggota secara sistematis dan argumentatif menjawab pertanyaan yang diajukan Ketua BPUPK: Apa dasar Indonesia merdeka? Sukarno selain menjawab dan mengkritisi pidato yang telah disampaikan peserta sidang juga mengajukan konsep dan gagasan dasar Indonesia merdeka yakni lima sila atau Pancasila. Pidato ini kemudian disepakati sebagai lahirnya Pancasila. Menurut Mohamad Hatta<sup>8</sup>, pidato Sukarno itu dikatakan sebagai bersifat kompromis, dapat menghilangkan pertentangan yang mulai menajam antara gagasan yang mengusulkan Negara Islam dan para peserta sidang yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama.

Dalam pidatonya, pertama kali Sukarno menyampaikan bahwa pidato yang telah disampaikan oleh para anggota BPUPK bukan gagasan dasar Indonesia merdeka. Menurut pandangan Sukarno yang diminta oleh Ketua BPUPK ialah dalam bahasa Belanda *Philosophische Grondslag* (Dasar falsafah) Indonesia Merdeka. *Philosophische Grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Selanjutnya Sukarno mengatakan bahwa tentang *Philosophische Grondlag* akan dikemukakan kemudian. Juga dikemukakan Merdeka sebagai Jembatan Emas dan Syarat Negara Merdeka. Pada bagian awal pidatonya Sukarno lebih menekankan dan mementingkan membicarakan dan

---

integralistik ini muncul kembali pada masa Orde Baru ketika berusaha membudayakan Pancasila dan UUD 1945 dengan menyatakan bahwa UUD 1945 disusun berdasar ide negara integralistik. Dalam Kusuma (2004, l.23) yang menjiwai UUD 1945 adalah Piagam Jakarta.

<sup>7</sup> Opcit, Kusuma, hal 112 dan 125

<sup>8</sup> Mohammad Hatta, 1977, Pengertian Pancasila, 6. Idayu Press, Jakarta, hlm. 9.

memberitahukan kepada seluruh anggota sidang, apakah yang diartikan dengan perkataan “merdeka”. Merdeka menurut Sukarno adalah “political independence”, *politieke onafhankheide lijkheid*. Kemudian Sukarno menjelaskan satu per satu isi Pancasila.

Sukarno menegaskan<sup>9</sup>:

*“Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma ini tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (seorang yang hadir: Pendawa Lima). Pendawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma; tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya Panca-Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah dahulu yang saya namakan socio-nationalisme. Dan demokrasi yang bukan*

*demokrasi Barat, tapi politiek-economische-democratie, yaitu politieke-democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan socio-democratie. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socio-nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadi koesoema buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. “Gotong-royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe! Gotong-royong adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.*

---

<sup>9</sup> Opcit, Kusuma, hal. 164 - 165.

*Holupis-kuntul-baris buatkepentingan bersama!  
Itulah gotong-royong.”*

### C. Gotong-Royong sebagai Modal Sosial

Gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara turun-temurun.<sup>10</sup> Gotong royong adalah bentuk kerja-sama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong-royong muncul atas dorongan keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar, secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah 'Gotong'.<sup>11</sup> Didalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbangan karyanya masing-masing, seperti tersimpul dalam istilah 'Royong'. Maka setiap individu yang memegang prinsip dan memahami roh gotong royong secara sadar bersedia melepaskan sifat egois. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi dan kepercayaan. Singkatnya, gotong royong lebih bersifat intrinsik,

yakni interaksi sosial dengan latar belakang kepentingan atau imbalan non-ekonomi.

Gotong-royong adalah suatu faham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, suatu perjuangan bantu-membantu. Gotong-royong adalah amal dari semua untuk kepentingan semua atau jerih payah dari semua untuk kebahagiaan bersama. Dalam azas gotong-royong sudah tersimpul kesadaran bekerja rohaniyah maupun kerja jasmaniyah dalam usaha atau karya bersama yang mengandung didalamnya keinsyafan, kesadaran dan sikap jiwa untuk menempatkan serta menghormati kerja sebagai kelengkapan dan perhiasan kehidupan. Dengan berkembangnya tata-tata kehidupan dan penghidupan Indonesia menurut zaman, gotong-royong yang pada dasarnya adalah suatu azas tata-kehidupan dan penghidupan Indonesia asli dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana mekar menjadi Pancasila. Prinsip gotong royong melekat substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi (peri kemanusiaan) yang merupakan basis pandangan hidup atau sebagai landasan filsafat Bangsa Indonesia.

Mencermati prinsip yang terkandung dalam gotong-royong jelas melekat aspek-aspek yang terkandung dalam modal sosial. Modal sosial secara konseptual bercirikan adanya kerelaan individu untuk mengutamakan kepentingan bersama. Dorongan kerelaan (keinsyafan dan kesadaran)

---

<sup>10</sup> Lihat bahasan Sartono Kartodijjo, 1987, "Gotong - royong: Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, dalam Callette, Nat.J dan Kayam, Umar (ed), Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah

Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia, Jakarta, Yaysan Obor.

<sup>11</sup> TUBAPI hal. 139-154 dengan beberapa perubahan.

yang dapat menumbuhkan energi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai-nilai modal sosial.

Apa itu modal sosial? Modal sosial adalah suatu konsep yang terdiri dari beberapa batasan dan definisi sesuai perkembangan wacana akademik. Namun, dalam batasan dan definisi unsur yang melekat dalamnya mengandung nilai jaringan sosial. Sejak diterima sebagai konsep akademis, modal sosial telah dimanfaatkan sebagai konsep penting dalam memahami persoalan dan masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat dan komunitas kontemporer. Konsep yang mendasari modal sosial sudah lama dibahas dalam kalangan para akademisi. Awalnya konsep modal sosial menjadi wacana dalam kalangan para filsuf ilmu sosial terutama mereka yang berusaha menjelaskan hubungan antara kehidupan masyarakat pluralistik dan demokrasi, terutama ini berkembang di Amerika Serikat.

Istilah modal sosial pertama kali muncul dalam tulisan Cohen dan Prusak tahun 1916<sup>12</sup> (dalam konteks peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, niat baik serta atribut-atribut sosial lain dalam bertetangga). Dalam karya tersebut, dijelaskan ciri utama modal sosial, yakni membawa manfaat internal dan eksternal bagi relasi sosial masyarakat. Kemudian

istilah modal sosial tidak muncul dalam literatur ilmiah selama beberapa dekade. Pada tahun 1956, sekelompok ahli sosiologi perkotaan Kanada menggunakannya dan diperkuat dengan kemunculan teori pertukaran Homans pada tahun 1961. Pada era ini, istilah modal sosial muncul pada pembahasan mengenai ikatan-ikatan sosial komunitas. Penelitian yang dilakukan Coleman di bidang pendidikan<sup>13</sup> dan Putnam mengenai partisipasi, pembangunan (pertumbuhan ekonomi) dan peran penting modal sosial di Italia<sup>14</sup>, telah menginspirasi banyak kajian mengenai modal sosial saat ini.

Berbagai aspek dari konsep modal sosial telah dibahas oleh semua bidang ilmu sosial dan sebagian mulai menggunakannya pada era modern ini. Namun, dalam pembahasan tidak secara eksplisit menjelaskan istilah modal sosial. Sering kali menggunakannya dalam kaitan dengan nilai jaringan sosial. Uraian mendalam ikhwat modal sosial yang pertama kali dikemukakan oleh Bourdieu<sup>15</sup>, selanjutnya, Coleman merupakan ilmuwan yang mengembangkan dan mempopulerkan konsep ini.<sup>16</sup> Pada akhir 1990-an, konsep ini menjadi sangat populer, khususnya ketika Bank Dunia mendukung sebuah program penelitian tentang hal ini, dan konsepnya mendapat perhatian publik melalui buku Putnam.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Cohen dan Prusak, 2001 dikutip dalam Ancok, 10. 2009, "Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat", dalam Bulaksumur Mengagas Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal. 334.

<sup>13</sup> Coleman, J, 1988, "Social Capital in The Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, 94, hal. 95-120.

<sup>14</sup> Putnam, Robert.D, 1993, "The Properius Community: Social Capital and Public Life", *The American Prospect*, 13, hal.35-43.

<sup>15</sup> Bourdieu, P, 1986, "The form of Capital", in Richardson (ed), pertama kali diterbitkan di Jerman tahun 1983.

<sup>16</sup> Coleman, J, 1990, *Foundation of Social Theory*, Cambridge, Harvard University Press.

<sup>17</sup> Putnam, Robert, D, 2000, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of America Community*, New York, Simon and Schuster.

Dari berbagai pengertian dapat diartikan modal sosial adalah bagian-bagian dari institusi sosial seperti kepercayaan, norma (etika) dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan bersama yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kemampuan dan kapasitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama dan saling tanggung jawab.<sup>18</sup>

Penggagas modal sosial Fukuyama<sup>19</sup> mengilustrasikan modal sosial melekat pada nilai-nilai *trust dan believe*. Artinya dalam modal sosial mengandung nilai-nilai kepercayaan (saling percaya) yang mengakar dalam faktor kultural, seperti etika dan moral. Ketika trust menjadi pegangan dalam interaksi sosial maka komunitas telah menanamkan nilai-nilai moral, sebagai jalan menuju berkembangnya nilai-nilai kejujuran. Disamping itu, Fukuyama juga menjelaskan bahwa asosiasi dan jaringan sosial lokal mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan pada aras lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. Sejalan dengan pandangan itu, Coleman<sup>20</sup> secara tegas menekankan bahwa modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial

secara teoritis mengandung perspektif ekonomi dan sosial. Pengertian ini dipertegas oleh Serageldin<sup>21</sup> bahwa modal sosial senantiasa melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat muncul bukan sebagai akibat dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis tetapi juga sebagai bagian dari interaksi sosial. Atas dasar itu Serageldin membedakan modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang tahan lama tetapi hubungannya searah, seperti pengajaran dan perdagangan serta interaksi sosial yang hubungannya resiprokal (timbang balik) seperti jaringan dan asosiasi sosial. Modal sosial dalam bentuk jaringan dan asosiasi sosial lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Pola relasi sosial tahan lama ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan komunitas lokal di Indonesia.

Dalam pandangan ilmu ekonomi, modal adalah segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan. Modal itu sendiri dapat dibedakan atas (1) modal finansial yang berbentuk uang; (2) modal fisik berbentuk gedung atau barang (bahan mentah); dan (3) modal manusia dalam bentuk kualitas pendidikan, kualitas hidup (kesehatan), keterampilan profesionalisme. Modal itu sebagai asset melalui tindakan kolektif menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai tambah. Namun, dalam proses pembangunan terjadi tuntutan perubahan karena dalam kenyataan daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam dapat memacu

<sup>18</sup> Fukuyama, Y, 1995, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, London, Hamish Hamilton.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Coleman, J, 1988, "Social Capital in The Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, 94, hal. 95-120.

<sup>21</sup> Serageldin, Ismail, 1996, "Sustainability as Opportunity and The Problem of Social Capital", *Brown Journal of World Affairs*, 3, hal. 187-203.

pertumbuhan ekonomi karena dukungan modal sosial Putnam.<sup>22</sup>

Coleman<sup>23</sup> menjelaskan modal sosial nilai yang melekat dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Putnam<sup>24</sup> berpendapat bahwa modal sosial dapat berwujud organisasi sosial seperti jejaring (*network*), norma/ etika (*norms*) dan kepercayaan (*trust*) yang mempermudah koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Itu mengandung makna bahwa modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jejaring, sehingga terjadi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Bagi Putnam modal sosial juga bisa dipahami sebagai pengetahuan, kesadaran dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas yang membentuk pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan untuk kepentingan bersama.

Bank Dunia<sup>25</sup> menekankan modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan

kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat kohesi sosial yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Menurut Fine<sup>26</sup>, modal sosial ini sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat dan komunitas. Setidaknya modal sosial dapat (1) memudahkan untuk mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) dapat berperan sebagai media saling mendistribusikan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) memupuk dan mengembangkan solidaritas; (4) mempermudah dalam mobilisasi sumber daya komunitas; (5) membuka kemungkinan untuk pencapaian tujuan bersama; dan (6) menuntun dan dijadikan rujukan dalam perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Dari sisi manfaat itu, modal sosial merupakan suatu komitmen bagi setiap individu dalam masyarakat untuk saling terbuka, saling percaya, saling memahami serta rela memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ketika nilai-nilai modal sosial menjadi dasar dalam relasi sosial maka muncul rasa kebersamaan, kesetiakawanan, solidaritas, toleransi, dan sekaligus tanggungjawab untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, hilangnya modal sosial dalam tata kehidupan masyarakat bisa jadi kesatuan masyarakat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga

---

<sup>22</sup> Putnam, Robert.D, 1993, "The Properius Community: Social Capital and Public Life", *The American Prospect*, 13, hal.35-43.

<sup>23</sup> Coleman, J, 1990, *Foundation of Social20. Theory*, Cambridge, Harvard University Press.

<sup>24</sup> Putnam, Robert, D, Op cit, hal. 35-43

<sup>25</sup> World Bank, 1998, "The Local Institution Study: Overview and Program Description", *Local Level Institution, Working Paper*, No.1

<sup>26</sup> Fine, Ben, 2001, *Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at The Turn of the Mellenium*, London, Routledge, hal. 178-185



dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi bahkan dihancurkan oleh pengaruh budaya atau nilai-nilai yang datang dari luar (asing).

Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan modal ekonomi (finansial, fisik, keterampilan). Telah banyak studi (lihat misalnya Fukuyama)<sup>27</sup> yang menunjukkan bahwa pembangunan tidak saja didorong oleh faktor ketersediaan sumber daya alam, besarnya modal finansial atau tingginya investasi ekonomi dan industrialisasi tetapi juga bertautan dengan matra sosial, khususnya modal sosial. Fukuyama<sup>28</sup> berhasil meyakinkan bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Negara-negara yang dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi (*high trust societies*) menurut Fukuyama<sup>29</sup>, cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (*low trust societies*) cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lamban dan inferior. Menurut Fukuyama modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Kunci dari modal sosial adalah *trust* atau saling percaya. Dengan *trust*, menurut Fukuyama, semua pihak bisa

bekerjasama dengan baik. Karena ada kesediaan diantara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. *Trust* dapat berfungsi sebagai energi sosial yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi mampu bertahan dari kemungkinan berbagai masalah yang dihadapi. Bila *trust* tidak menjadi pegangan dalam berinteraksi dapat mengakibatkan banyak energi terbuang sia-sia karena hanya dipergunakan untuk mengatasi saling curiga dan konflik yang berkepanjangan. Masyarakat memiliki persediaan modal sosial berbeda-beda tergantung seberapa jauh jangkauan moral kerjasama, seperti kejujuran, solidaritas, pemenuhan kewajiban dan rasa keadilan. Perbedaan itu yang menyebabkan ada perbedaan dalam perkembangan masyarakat.

#### **D. Situasi Masyarakat Kontemporer dan Budaya Gotong-Royong**

Belakangan ini interaksi sosial masyarakat Indonesia dapat digambarkan sedang mengalami situasi kekacauan sosial. Kekacauan sosial ini mirip dengan konsep *anomie* yang digunakan oleh Durkheim<sup>30</sup> untuk menggambarkan kondisi relasi masyarakat atau individu dimana konsensus melemah, nilai-nilai dan tujuan (*goal*) bersama meluntur, kehilangan pegangan nilai-nilai norma dan kerangka moral, baik secara kolektif maupun

---

<sup>27</sup> Fukuyama, Y, 1995, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, London, Hamish Hamilton.

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Jary, David dan Jary, Yulia, 1991, *Dictionary of Sociology*, Glasgow, Harper Collin Publisher, hal.22-23

individu. Ini terjadi karena perubahan sosial berlangsung begitu cepat sehingga terjadi disorientasi nilai-nilai.<sup>31</sup> Dalam konteks Indonesia perubahan sosial seiring dengan reformasi yang terjadi tanpa terencana (dalam waktu singkat) telah menyebabkan nilai-nilai lama yang selama ini menjadi pegangan dan acuan dalam relasi sosial berbasis pada semangat dan nilai-nilai gotong royong mulai melemah. Sementara itu, nilai-nilai baru yang berkembang selama era reformasi masih lemah dan belum dapat dijadikan acuan dan pegangan. Belakangan ini justru muncul nilai-nilai baru dalam relasi sosial masyarakat yang mengarah pada mengutamakan kebebasan. Ada kecenderungan relasi sosial lebih bersifat individualis bercampur dengan sifat materialistik. Juga ada indikasi bahwa dalam relasi sosial mengesampingkan nilai-nilai kebersamaan, moral, etika dan toleransi. Relasi sosial yang selama ini bersifat *intrinsic*<sup>32</sup> yakni hubungan yang ganjarannya tidak bermotif ekonomi, berubah menuju bersifat *extrinsic* yang ganjarannya sering bermotif kepentingan ekonomi (nilai materialistik). Mengapa terjadi disorientasi nilai? Sebagai sebuah perubahan sosial, tentu banyak faktor berpengaruh pada proses disorientasi nilai-nilai itu. Modernisasi yang telah berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan selama beberapa dekade tentu mempunyai kontribusi. Namun, banyak pengamat

menduga disorientasi nilai itu berlangsung akibat pengaruh ideologi asing<sup>33</sup> yang masuk bersamaan dengan globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

Dalam beberapa dekade belakangan ini perlahan tetapi pasti sebagian besar tatanan kehidupan ekonomi, sosial-budaya dan politik dirasuki gaya hidup konsumerisme (konsumsi yang mengada-ada)<sup>34</sup> dan kebebasan hampir tanpa kendali. Fenomena itu juga ditandai dengan meningkatnya hasrat menghamba pada kekuasaan dan materi. Watak hedonisme, individualisme, budaya anarkis (kekerasan), konflik dan saling menyakiti (saling bunuh) merebak dalam tata interaksi sosial kehidupan. Norma-norma sosial dan etika sebagai perekat kehidupan berbangsa diabaikan. Tidak dapat dielakkan norma-norma lama satu per satu diganti dengan norma-norma baru yang berbasis pada nilai-nilai individualis. Konsensus moral yang menjadi kerangka dasar dalam interaksi sosial bertumpu pada nilai-nilai gotong royong yang cukup penting dalam memproduksi tatanan kehidupan, cenderung diabaikan dan dikesampingkan.

Gotong royong tampaknya hanya berfungsi sebagai simbol belaka. Sering didiskusikan tetapi kurang dipraktekkan dalam relasi sosial kehidupan masyarakat. Bahkan ada upaya untuk menyingkirkannya karena dianggap tidak pas lagi dengan tuntutan kehidupan masa kini. Untuk

---

<sup>31</sup> Dalam Veeger.K.J (1985: 7-8) dijelaskan bahwa pada abad 19 setelah revolusi Perancis dicirikhaskan oleh pergolakan di segala bidang keganasan, persengketaan, dan krisis akhlak. Struktur-struktur feodal beserta nilai-nilai dasarnya menghilang, sedang struktur-struktur baru masih bersifat lemah atau berada dalam taraf eksprimen dan belum memperoleh doa restu dari tradisi, sehingga kekacauan sosial-politik melanda Eropa.

<sup>32</sup> Lihat bahasan Arrow, Kenneth.J, 2000, "Observation on Social Capital", dalam Dasgupta, Parta dan Serageldin,

Ismail, Social Capital: Multifaceted Perspective, Wasington.D.C, The World Bank.

<sup>33</sup> Kompas, 2013, Pengaruh Asing Makin Meluas, Minggu 19 Mei 2013, hal. 1

<sup>34</sup> Herry-Priyono di kutip dalam Tumenggung, Adeline May, 2005, "Kebudayaan (para) Konsumen", dalam Muji Sutrisno dan Hendar Putranto (penyunting), 2005, Teori-Teori Kebudayaan, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hal. 257-270

menyesuaikan dengan perubahan sesuai arahan nilai-nilai baru maka diperlukan konstitusi dan norma-norma baru. Banyak perubahan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tetapi cukup banyak perubahan yang dilakukan diluar kesadaran karena ada desakan kepentingan politik-ekonomi dari pihak-pihak tertentu (agen-agen) lewat berbagai macam institusi ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>35</sup>

Dalam bidang ekonomi, azas demokrasi ekonomi yang bertumpu pada sistem gotong royong kekeluargaan (koperasi) secara perlahan dirubah menuju pada sistem pasar terbuka dan bebas. Untuk mendukung perubahan itu diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti pasar modal dan lembaga lain. Badan usaha yang selama ini dibawah pengawasan negara karena menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak satu persatu di privatisasi (dijual ke swasta sesuai tuntutan sistem pasar bebas). Tidak hanya itu, eksplorasi sumberdaya alam yang seharusnya dikuasai negara dan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga dilego ke pasar yang kemudian banyak dikuasai perusahaan asing yang dimiliki oleh negara-negara maju pengagagas sistem neoliberal.

Perubahan juga terjadi dalam sistem politik. Sistem politik telah berubah ke arah sistem demokrasi liberal. Setiap jenjang aparat eksekutif pemerintah, bupati, gubenur dan presiden serta anggota legislatif dipilih dengan sistem demokrasi liberal

(one head one vote). Memang dengan sistem itu kedaulatan rakyat dapat dipenuhi dan dijalankan dengan baik karena dipandang sesuai tuntutan hak azasi manusia. Namun, karena masyarakat belum siap untuk menjalankan sistem itu maka dalam pelaksanaan banyak terjadi anomali yang cukup mengganggu relasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Media seringewartakan peristiwa konflik antar kelompok masyarakat yang terjadi di berbagai daerah, baik karena pilkada (pilihan bupati dan gubernur) maupun pileg (pilihan anggota legislatif). Tawuran antar warga. Pertikaian antar oknum penegak hukum.

Adaptasi terhadap perubahan sistem politik itu telah menimbulkan berbagai macam implikasi bagi relasi sosial masyarakat, baik di aras nasional maupun lokal.<sup>36</sup> Proses politik kenegaraan di tingkat nasional dan lokal diwarnai dengan hasut-hasut menghasut, politik uang, saling menjatuhkan, fitnah melalui selebaran gelap. Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan tidak dapat menjalankan fungsinya secara penuh karena demi "demokrasi", legislatif senantiasa melakukan kontrol terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan jadi wewenangnya. Elit politik di legislatif dengan dalih menjalankan prinsip demokrasi di berbagai kesempatan menunjukkan kekuasaannya tanpa mengindahkan kepentingan bersama untuk kemajuan bangsa. Suara rakyat sebagai konstituen yang memilih mereka kurang diperhatikan dan cenderung diabaikan.

<sup>35</sup> Lihat Tulisan Peranan Pihak Asing Dalam Proses Amandemen dan Konstitusi disebutkan keterlibatan Multi National Corporation, NDI ( tidak dipublikasikan)

<sup>36</sup> Dalam kaitan dengan akibat sistem liberal ini, beberapa anggota BPUPKI dalam pidatonya memperingatkan bahwa sistem liberal cenderung bersifat individualisme

dan kurang sesuai dengan sifat-sifat dasar (karakter ) bangsa Indonesia, lihat RM A.B. Kusuma, 2004, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 112, 125 dan 131.

Perubahan politik di tingkat nasional dan lokal dalam upaya menerapkan demokrasi telah berlangsung. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat telah berubah dengan dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah.<sup>37</sup> Otonomi daerah telah memungkinkan pembagian kekuasaan dan pendistribusian dana pembangunan antara pusat dan daerah lebih proporsional. Kepala daerah memiliki kekuasaan untuk menerapkan berbagai kebijakan sesuai kebutuhan daerah. Namun, sejauh ini otonomi daerah nampaknya cenderung dimaknai sebagai peluang ekonomi dan politik untuk memenuhi hasrat kepentingan merengkuh kepuasan materi dan kekuasaan para elit dan para petualang politik yang haus kekuasaan dan materi. Tidak mengherankan kemudian beberapa kepala daerah (bupati), gubernur, anggota DPR/DPRD dan para elit politik terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan terlibat korupsi. Cukup banyak para koruptor itu menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Tampaknya tidak ada kata jera atau mengatakan tidak pada korupsi. Justru belakangan ini perilaku korupsi kian meningkat dan merajalela. Media hampir setiap hari menayangkan dan melaporkan kasus korupsi para petinggi partai dan pejabat negara. Tidak sedikit para koruptor itu menjadi tersangka dan yang telah dijebloskan ke penjara oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Hancurnya nilai-nilai moral dan kesadaran kebersamaan ini bisa jadi mendorong para koruptor tanpa merasa bersalah menilep dana APBN yang dikumpulkan dari tetesan keringat rakyat. Dana APBN sering di salahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Meskipun masih banyak

rakyat yang hidup dililit kemiskinan tetapi para koruptor mempertontonkan gaya hidup bermewah-mewah. Para koruptor membeli beberapa rumah mewah, mobil dengan harga fantastis milyaran rupiah dan perilaku memperbanyak isteri (*siri*). Kesadaran bahwa tindakan korupsi adalah perilaku yang merugikan dan dapat memiskinkan rakyat sirna ditelan syahwat serakah.

Bersamaan dengan itu, nilai-nilai demokrasi liberal yang menjadi acuan selama 15 tahun ini tidak hanya memperlumah sistem politik nasional dan lokal dan fungsi negara tetapi juga telah mempengaruhi perilaku aktor politik dalam interaksi sosial. Ada kecenderungan interaksi sosial para elit politik tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai sosial (moral/etika) tetapi lebih menonjolkan nilai materi (uang). Hasrat memenuhi tuntutan materi (uang) telah mengesampingkan nilai-nilai moral (etika) yang terkandung dalam gotong royong. Tanpa disadari pembusukan moral (korupsi, teror, intimidasi, prasangka dsbnya) merebak dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial maupun politik. Nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan sosial-politik telah melonggar kalau tidak boleh dikatakan hancur berantakan karena dorongan hasrat mengejar rente ekonomi (keuntungan ekonomi) sesaat. Money Politics (politik uang) atau suap menyuap, korupsi adalah menjadi kenyataan dalam berbagai tingkatan kehidupan politik. Elit politik mulai dari tingkat nasional sampai lokal terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan praktek korupsi dan politik uang. Memang permainan uang dalam sistem politik liberal dapat dibenarkan tetapi ada koridor etika yang mengontrol dan tidak bebas sesuka hati

---

<sup>37</sup> Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah 2000, Jakarta, Restu Agung.

dan seenaknya. Transparansi dan akuntabilitas pada publik adalah salah satu alat kontrol yang penting dilakukan dalam sistem demokrasi. Tetapi hal itu belum berjalan dan diterapkan karena pemahaman demokrasi tampaknya baru sebatas pada kebebasan atau sekadar euforia kebebasan. Saat ini ada yang berpendapat bahwa demokrasi masih dalam masa transisi yang dipenuhi dengan kontradiksi-kontradiksi di sana-sini. Keadaan inilah yang menimbulkan kekecauan sosial karena perubahan seakan tanpa arah. Tidak hanya itu kehidupan pun mulai bersifat individualis disertai dengan merebaknya gejala alienasi dan kekerasan, baik verbal maupun simbolik, sehingga kehidupan terasa hampa tanpa makna.<sup>38</sup>

Insting-insting paling mendasar bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang berpegang teguh pada norma-norma dan etika moral dalam tata kehidupan lenyap atau sirna. Insting-insting manusia sebagai makhluk ekonomi lebih menonjol. Rasionalitas sosial yang memungkinkan manusia untuk saling bekerja sama dengan sesama atau orang lain tidak menjadi pegangan. Yang muncul ke permukaan adalah dorongan hasrat untuk berkuasa dalam rangka mereguk keuntungan ekonomi. Akibatnya, permusuhan antar sesama karena saling berkompetisi, saling mencurigai dan prasangka-prasangka senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat. Semua ini mendorong pada situasi kekacauan sosial yang kemudian menyebabkan menurunnya sistem kekeluargaan, kebersamaan dan kepercayaan sebagai penguat kohesi sosial. Perasaan kebersamaan meluntur dan semangat

saling menjatuhkan dan bermusuhan muncul ke permukaan. Ancaman disintegrasi sosial tampaknya akibat yang mungkin tidak dapat terelakkan. Saling tidak percaya dan curiga senantiasa menyertai kehidupan. *Trust* sebagai nilai penting dalam mendorong kebersamaan, seperti yang dijelaskan oleh Fukuyama, sangat rendah. Pemimpin tidak mempercayai rakyat dan rakyat tidak mempercayai pemimpin, elit politik tidak percaya pada masyarakat dan masyarakat tidak percaya lagi pada elit politik dan seterusnya. Krisis kepercayaan ini tidak hanya melanda tatanan kehidupan politik nasional tetapi juga lokal. Hujat menghujat, saling mencerca ditingkahi dengan kekerasan adalah bagian dari tata kehidupan sosial masyarakat.

Saat ini, sadar atau tidak, secara praksis masyarakat Indonesia hanyut ke dalam situasi terombang ambing ibarat sabut di tengah hempasan gelombang laut. Hanyut tidak menentu ke sana kemari tanpa arah. Kehilangan orientasi nilai-nilai (ideologi) cita-cita luhur kehidupan berbangsa (idealisme). Nilai-nilai budaya yang tidak berakar pada budaya lokal secara perlahan tetapi pasti telah mengerosi kesadaran kolektif sebagai suatu bangsa. Kesadaran moral berlandaskan budaya gotong royong yang menjadi pegangan dalam tata pergaulan berbangsa ikut tercuci dan secara perlahan memudar. Dalam situasi seperti itu interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat diwarnai dengan tingkah yang mengarah pada demoralisasi dan dehumanisasi. Kehampaan dan kegalauan menyelimuti masyarakat. Jiwa dan raga bangsa ini terasa semakin rapuh. Agar tidak terpuruk ke dalam jurang

---

<sup>38</sup> Budi Hardiman, 1980, "Kritik Atas Patologi. Modernitas dan Post Modernisme", *Drikarya*, No 2, Tahun XIX, hal. 42-63.

kehancuran atau disintegrasi bangsa maka kita perlu menumbuhkan kembali kesadaran kolektif dengan kembali pada nilai-nilai modal sosial yang terkandung dalam budaya gotong royong. Tanpa upaya itu jalan mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa tampaknya sulit diraih.

### **E. Apa yang Perlu Dilakukan ke Depan?**

Perubahan bisa terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Memang ada sebagian orang terus berharap bahwa pemerintah (penguasa) atau negara dan elit politik dapat melakukan perbaikan untuk masa depan kehidupan bangsa. Namun, negara akhir-akhir ini kian tidak berdaya (lumpuh) dalam cengkeraman pengaruh kekuatan asing. Kontrol kekuasaan negara, baik ekonomi maupun politik semakin melemah. Akibatnya, tatanan politik nasional dan lokal seakan tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan masyarakat yang senantiasa berubah secara tidak terduga serta seakan tanpa arah sejak paham liberal menyeruak memasuki kehidupan politik. Kepentingan-kepentingan yang beragam dari masyarakat dalam menuntut persamaan hak, keadilan, dan partisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan belum tersalurkan. Institusi (partai) sebagai wadah masyarakat menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan perbaikan nasib serta kesetaraan masih belum berfungsi seperti yang diharapkan.

Dalam banyak hal para elit sering menggunakan kekuasaan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi pribadi

atau kelompok daripada untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat mencapai perbaikan kesejahteraan. Dalam situasi seperti itu, gotong royong untuk membangun kebersamaan nyaris tidak terdengar dalam khasanah kehidupan. Bahkan para pemimpin dan elit terasa enggan mengucapkan gotong royong dan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa.

Menyadari hal itu maka mau tidak mau dibutuhkan gerakan untuk menggerakkan kekuatan (energi sosial) baru bila menginginkan ada perbaikan dalam tatanan kehidupan. Lembaga-lembaga politik (termasuk partai) dirasa perlu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan tuntutan masyarakat kalau tidak mau terjadi disintegrasi sosial. Hal yang tidak bisa dihindarkan adalah tatanan sosial dan moral harus mengikuti tuntutan masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan konsensus etika dan moral dalam kehidupan politik. Tuntutan moral dari masyarakat adalah persatuan, kejujuran, toleransi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling bekerja sama. Untuk itu diperlukan tindakan kolektif yang bisa menjadi pengikat kohesi sosial.

Menghadapi gelombang perubahan kehidupan akibat gerusan arus pengaruh budaya asing perlu ada kekuatan (energi sosial) yang dapat mengarahkan pada terbentuknya komitmen moral dengan memunculkan gerakan yang berusaha membebaskan diri dari kungkungan hegemoni budaya asing yang telah memporak porandakan modal sosial gotong royong. Nilai-nilai yang memunculkan kesadaran palsu perlu dikounter dengan memunculkan kembali kesadaran kolektif yang bersandar pada nilai-nilai modal sosial gotong royong yang meletakkan bahwa manusia adalah

mahluk sosial yang membutuhkan aturan-aturan moral (norma-etika), kerjasama, saling percaya, dan jejaring. Atas dasar itu perlu dikembangkan nilai-nilai atau norma-norma yang mengandung nilai-nilai moral (ketuhanan) yang dapat dijadikan pijakan perilaku bertindak dalam tata pergaulan politik keseharian seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (perikemanusiaan) dengan tidak saling menyakiti (dengan melakukan tindakan kekerasan) pada sesama, mengutamakan dialog/komunikasi dan musyawarah dengan menghindari sifat mau menang sendiri, menjaga persatuan atas prinsip kemajemukan (*bhineka*) atas dasar kesediaan untuk bekerjasama (gotong royong) dan saling menghargai, berlaku adil pada sesama dengan menghindari kesewenang-wenangan. Kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip itu dalam relasi sosial adalah penting dilakukan dalam rangka membangun kesadaran moral kolektif yang bersumber pada nilai-nilai modal sosial yang melekat pada budaya gotong-royong.

Apakah dukungan kultural (tradisional) masih dapat dipertahankan untuk masa depan? Dalam masyarakat yang terimbas ideologi asing (liberal) basis kultural cenderung melemah. Kepentingan sesaat kadang-kadang lebih menonjol ketimbang nilai-nilai idealisme dalam mencapai tujuan bersama. Kemampuan bawaan nilai-nilai kultural mungkin masih bisa diharapkan menjadi sarana memunculkan kesadaran kolektif. Sisa-sisa nilai-nilai berbasis kearifan lokal dan gotong royong masih ditemui dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, ketika Bantul diporak porandakan hempasan gempa pada tanggal 26 Mei 2006, dalam waktu kurang dari satu tahun masyarakat dapat

bangkit karena didorong semangat gotong royong. Eksistensi institusi lokal berbasis nilai-nilai gotong royong juga masih eksis dalam kehidupan masyarakat lokal. Institusi-institusi itu dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk menggerakkan kesadaran kolektif.

Ada banyak institusi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat budaya gotong royong, seperti lembaga Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dukuh, Desa, rembug desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lokal lainnya. Institusi formal lokal ini seyogyanya diperkuat perannya dalam proses pengembangan komunitas lokal. Melalui institusi-institusi lokal itulah modal sosial nilai-nilai gotong royong dapat tumbuh dan berkembang menjadi energi sosial gerakan dalam memperkuat kohesi sosial. Selain institusi formal lokal itu, institusi informal juga dapat dijadikan untuk memperkuat budaya gotong royong yang sudah eksis dalam komunitas lokal. Misalnya, di Jawa eksis institusi *sambatan*, *arisan*, *jimpitan*; di Maluku ada tradisi *pela gadong*; di Tapanuli ada adat *Dalihan Na Tolu*; di Minahasa eksis *Mapalus*; di Bali ada *seka*, *banjar* dan tiap etnis di Nusantara ini ditemui institusi sosial informal yang selama ini telah menerapkan nilai-nilai gotong royong dan demokrasi berdasarkan mufakat dan musyawarah.

Untuk mencapai itu, perlu menciptakan suasana sosial yang membuka peluang menguatnya kembali budaya gotong royong. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah meningkatkan kemampuan (*capacity building*) menekankan pada otonomi (kemandirian) komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, keswadayaan lokal (*local self-reliance*) yang bersifat partipatoris (demokrasi), melalui pemberdayaan dan adanya proses pembelajaran

sosial. Ini dapat diartikan sebagai upaya sistematis terencana untuk meningkatkan kemampuan serta memberikan kewenangan dan otoritas pada masyarakat (komunitas) lokal sehingga mereka dapat memutuskan secara demokrasi partisipatif dengan mengutamakan mufakat dan musyawarah apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Campuran kekuatan eksternal perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

kebersamaan, menjunjung tinggi moral/etika, kejujuran, saling percaya sebagai pintu masuk menuju penguatan kembali (revitalisasi) budaya gotong royong.

## **F. Penutup**

Bahasan di atas mengarahkan pada pemahaman bahwa gotong royong telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita sejak lama. Dalam budaya gotong royong melekat nilai-nilai substansi modal sosial. Sebagai modal sosial, gotong royong dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Itu artinya bila masyarakat masih memegang teguh prinsip gotong royong sebagai modal sosial maka lebih mudah dalam mencapai kemajuan bersama. Sebaliknya, bila nilai-nilai gotong royong yang terkandung dalam modal sosial tidak lagi menjadi pegangan dan rujukan dalam masyarakat dan komunitas bisa jadi akan mengalami kesulitan karena energi sosial bisa terbuang sia-sia dan berpotensi menghalangi mencapai tujuan kemajuan bersama. Bahkan bisa memicu munculnya kekacauan sosial.

Maka sudah saatnya budaya gotong-royong kembali diperkuat dan dijadikan rujukan dan acuan dalam kehidupan berbangsa. Salah satu upaya yang dapat dipikirkan adalah memperkuat institusi sosial lokal yang selama ini masih bertumpu pada nilai-nilai



## Daftar Pustaka

- A.B. Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arrow, Kenneth.J. 2000, "Observation on Social Capital", dalam Dasgupta, Parta dan Serageldin, Ismail, *Social Capital: Multifaceted Perspective*. Washington DC: The World Bank
- Bourdieu, P. 1986. "The form of Capital", in Richardson (Ed) *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*. New York: Greenwood.
- Budi Hardiman, 1980. "Kritik Atas Patologi Modernitas dan Post Modernisme", *Drikarya, No 2, Tahun XIX: 42-63*
- Cavallaro, Dani. 2004. *Teori Kritis dan Teori Budaya*. Yogyakarta, Penerbit Niagara: 141.
- Cohen dan Prusak (2001) dikutip dalam Ancok. 2009. "Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat", dalam *Bulaksumur Mengagas Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Coleman, J. 1988. "Social Capital in The Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology, 94: 95-120*
- Coleman, J. 1990. *Foundation of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press
- Fine, Ben. 2001. *Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at The Turn of the Mellenium*. London: Routledge, hal. 178-185
- Fukuyama, Y. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. London: Hamish Hamilton Affairs, 3: 187-203
- Hatta, Mohammad. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Jary, David dan Jary, Yulia, 1991, *Dictionary of Sociology*, Glasgow, Harper Collin Publisher, hal.22-23
- Putnam, Robert.D, 1993, "The Properius Community: Social Capital and Public Life", *The American Prospect, 13, hal.35-43*.
- Putnam, Robert, D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of America Community*. New York: Simon and Schuster.
- Sartono Kartodijo, 1987, "Gotong -royong: Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, dalam Callette, Nat.J dan Kayam, Umar (ed), *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Tumenggung, Adeline May. 2005. "*Kebudayaan (para) Konsumen*", dalam Muji Sutrisno dan Hendar Putranto (penyunting), *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 257-270
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia
- World Bank. 1998. "The Local Institution Study: Overview and Program Description", *Local Level Institution, Working Paper, No.1*

*Sumber Lain:*

Kompas, 2013, Pengaruh Asing Makin Meluas,  
Minggu 19 Mei 2013, hal.1

Undang-Undang Otonomi Daerah. 2000, Jakarta:  
Restu Agung